

KOMUNIKASI ADAPTIF KEMENDES DAN KEPELOPORAN PEMUDA DESA

LIMA tahun ke depan, tidak salah kalau masyarakat desa menaruh harapan akan masa depan desa yang lebih baik. Mengapa? Karena komitmen dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka (Prabowo-Gibran) terlihat nyata keberpihakannya kepada desa.

Komitmen tersebut dapat terbaca dalam Asta Cita nomor enam yang bunyinya "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Asta Cita keenam ini kemudian di-*break down* dengan lebih *operationally* oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal [Yandri Susanto](#) ke dalam dua belas *action plan* di bawah tema besar "Bangun Desa, Bangun Indonesia".

Dilandasi komitmen kinerja seratus hari kabinet Merah Putih, paling sedikit sudah ada dua langkah konkrit Menteri Yandri Susanto yang terpajang di etalase [Kementerian Desa](#) dan PDT.

Pertama adalah cara Pak Menteri untuk memastikan efektif dan efisien komunikasinya ke desa. Strategi/cara yang ditempuh adalah menginap di desa dalam kunjungan-kunjungan kerjanya ke desa-desa bersama jajarannya. Penginapan beliau di tengah-tengah masyarakat desa yaitu di rumah-rumah warga.

Kedua adalah program Pemuda Pelopor Desa. Program ini merupakan action plan ke enam Kementerian Desa dan PDT. Program ini baru saja dilaunching di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Desa Nagrak Utara yang juga dihadiri oleh Utusan Presiden Bidang Kepemudaan dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang selama ini kita kenal sebagai artis.

Launching Program Pemuda Pelopor Desa terselenggara pada tanggal 24 Desember 2024 di tengah-tengah berlangsungnya Rapat Kerja Kementerian Desa dan PDT tanggal 22 sampai 24 Desember 2024.

Lokasi Rapat Kerja Kementerian dan *Launching* Pemuda Pelopor Desa memang sengaja disatukan pada satu titik yakni mengambil lokasi di Kabupaten Sukabumi.

Maksudnya agar peserta rapat kerja dan masyarakat diajak untuk turut berempati pada penderitaan warga Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran yang terkena bencana banjir dan tanah longsor, sekaligus mewujudkan empati melalui penyerahan bantuan kemanusiaan dari Kementerian Desa dan PDT.

Metode komunikasi dengan strategi/cara menginap di desa sebagaimana digagas dan diwujudkan sendiri oleh Menteri, tentu membutuhkan kesamaan *effort* dan niat dari seluruh jajaran Kementerian, karena jika konsisten, maka kurun waktu 5 tahun untuk pengimplementasiannya bukanlah waktu yang singkat.

Dengan mengabaikan perhitungan hari kerja yang jumlahnya 22 hari dalam satu bulan, (pengukuran kinerja Menteri Kabinet Merah Putih adalah 100 hari kalender), maka paling kurang dibutuhkan 9 hari implemented dalam sebulan.

Dari mana perhitungannya? Jumlah 365,5 hari dalam setahun jika dikalikan 5 tahun menjabat, maka itu sama dengan 1.827,5 hari dan jika seperempat porsi saja waktu yang digunakan untuk merealisasikan strategi menginap di desa, maka itu setara dengan 456 hari dalam kurun waktu 5 tahun atau sama dengan 114 hari setahun, atau sembilan hari dalam satu bulan.

Tentu ini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang sulit untuk dijalankan, apabila strategi ini dipandang sebagai cara menjalankan amanah dan suatu bentuk terobosan. Kurang lebih 11 tahun yang lalu penulis juga pernah menggagas strategi yang sama meski dalam konteks yang berbeda.

Gagasan strategi itu dilatarbelakangi oleh sulitnya menemukan kesempurnaan dan kesesuaian berkas administrasi pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan program kegiatan bantuan pemerintah pusat di daerah yang pembiayaannya berasal dari Kementerian/pusat.

Penyampaian pertanggungjawaban keuangan dari staf pemerintah daerah, berdasarkan panduan prinsip-prinsip pertanggungjawaban, tidak selalu dapat diselesaikan dengan benar dan sesuai, apalagi tepat waktu.

Akibatnya, harus melakukan perbaikan berkas dan imbasnya, staf pemerintah daerah harus kembali melakukan perjalanan dinas ke pusat sampai pertanggungjawaban dinilai telah sesuai.

Itulah mengapa penulis berkesimpulan bahwa akan lebih efektif dan efisien apabila Kementerian/pusat sebagai pemberi bantuan mengutus pegawainya untuk melakukan asistensi *on location*, langsung ke pemerintah daerah setempat dengan difasilitasi perjalanan dinas biasa.

Jika waktu asistensi melebihi tiga hari, maka kelebihan waktu menetap di daerah untuk melanjutkan kerja asistensi menjadi tanggung jawab pegawai yang melakukan asistensi.

Biaya makan dan minum dapat ditanggulangi oleh pegawai yang bersangkutan, karena logikanya baik dinas maupun tidak, tetap perlu mengeluarkan biaya untuk makan dan minum dimanapun dia berada.

Sedangkan untuk biaya penginapan, dapat dipercepatkan dengan pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan rumah warga atau wisma Pemda. Semua butuh pengorbanan, tapi tidak terlalu merugikan jika dibandingkan dengan apa yang sudah negara berikan. Saya kira semua akan dengan senang hati melaksanakannya sebagai ladang amal, dan karena tidak semua memiliki kesempatan untuk itu.

Dengan menginap di desa, sudah tentu akan terbangun *chemistry* di antara Kementerian dan pengampu kepentingan di desa. Di saat yang sama denyut nadi

rutinitas desa dan warga masyarakatnya dapat didengar dan dirasakan langsung oleh menteri dan jajaran.

Di kemudian hari dapat lebih objektif untuk menilai dan menganalisis fakta-fakta sosial yang terjadi di desa, memahami tipikal anthroposentris lokal, baik melalui observasi langsung maupun hasil berkomunikasi dan berdiskusi dengan penduduk setempat, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Data dan informasi yang diserap melalui strategi menginap di desa akan lebih komparatif dan komprehensif bersanding dengan data dan informasi yang juga disuplai langsung dari desa (Kementerian Desa dan PDT juga memiliki Tenaga Pendamping Profesional sebagai keterwakilan Kementerian di desa-desa, dan bisa saja berkolaborasi).

Hasilnya, opini maupun rekomendasi yang disajikan tentang desa, jauh lebih faktual dan objektif untuk dijadikan bahan evaluasi program dan kegiatan sekaligus perencanaan periode berikutnya.

Untuk penerapan menginap di desa, dapat menggunakan sistem piket, yang dikombinasi dengan kegiatan perjalanan dinas. Strategi ini sukses diterapkan oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi dalam bentuk program Kuliah Kerja Nyata, meskipun sekarang gemanya hampir sudah tidak kedengaran, dan bukan lagi primadona.

Kedua adalah program Pemuda Pelopor Desa. *Goal/s* utamanya adalah mencegah terjadinya urbanisasi pemuda desa, sekaligus pemuda desa yang ada di kota dimotivasi agar mulai berpikir dan mempertimbangkan untuk kembali ke desa, membangun desa dengan ketrampilan teknis dan kekayaan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki yang didapatkan dari kota.

Terminologi pelopor sengaja direkatkan pada pemuda, karena pada pundak pemuda-pemuda desa jugalah terpicul beban dan tanggung jawab sebagai penerus masa depan bangsa, menjadi sumber inspirasi, berjiwa solutif dan inovatif.

Motto Bangun Desa Bangun Indonesia jangan sampai hanya menjadi slogan bisu. Melalui kepeloporan Pemuda desa, tanggung jawab untuk merawat, memajukan serta mempertumbuhkan bangsa akan berkelanjutan dari desa.

Pemuda yang pengkategoriannya dihasilkan dari statistisi jumlah penduduk Indonesia, juga termasuk pemuda yang tersebar di tujuh puluh lima ribu desa (menurut hasil Susenas tahun 2022, perkiraan jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia yaitu 24,00%; <https://www.bps.go.id>, diakses 30-12-2024, jam 11.29).

Pemuda ketika diberi tanggung jawab dan pendelegasian tugas dari pemerintah (dengan memperhitungkan tipikal pemuda di mana mereka akan lebih berakselerasi jika diberi ruang gerak yang independen saat pengejawantahan dan pelaksanaan tugas), akan menjadi gelombang pergerakan yang besar dan masif di desa-desa. Gemanya akan sampai ke kota-kota.

Pemerintah sebagai pemilik program, cukup melaksanakan pembimbingan serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dipercayakan kepada Pemuda Pelopor Desa.

Yang menarik adalah terciptanya titik temu dari dua langkah konkrit terbahas di atas. Pembimbingan dan monev Kementerian tersedia *on schedule* melalui strategi menginap di desa, dan Pemuda Pelopor Desa terfasilitasi dengan pembimbingan dan monev secara berkala dan terprogram.

- Penulis : [Cohen Tunliu](#), Aparatur Sipil Negara di Kementerian Desa PDT

- [Paulus Nitbani](#) - Selasa, 31 Desember 2024 | 06:52 WIB